

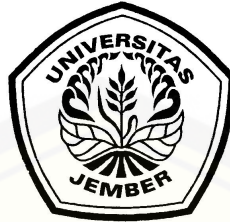
**UPAYA KELOMPOK BUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) “SUKA MAJU”
DALAM MEMBERDAYAKAN ANGGOTANYA MELALUI
PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA IKAN LELE
(Studi Deskriptif Pada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) “Suka Maju”
di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh :

**Dian Eko Saputro
NIM. 040910301132**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2010**



**UPAYA KELOMPOK BUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) “SUKA MAJU”
DALAM MEMBERDAYAKAN ANGGOTANYA MELALUI
PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA IKAN LELE**

*(Studi Deskriptif Pada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) “Suka Maju”
di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi)*

**Pokdakan “Suka Maju” Effort In Empowerment Its Members By Catfish
Cultivation**

*(Case Study on Fish Cultivation Group (POKDAKAN) “Suka Maju” from
Wringinrejo Village Gambiran Sub Distric Banyuwangi Regency*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

**Dian Eko Saputro
NIM. 040910301132**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Upaya Kelompok Budidaya ikan (POKDAKAN) "Suka Maju"* Dalam memberdayakan Anggotanya Melalui Usaha Budidaya Ikan Lele telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21 Juni 2010
Pukul : 15.00 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sama'i, M.Kes

NIP. 19571124 198702 1 001

Drs. Partono, M.Si

NIP. 19560805 198603 1 003

Anggota I,

Kris Hendrijanto, S.Sos, M.Si

NIP. 19700103 199802 1 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP 195207277 198103 1 003

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Eko Saputro

NIM : 040910301132

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **Upaya Kelompok Budidaya ikan (POKDAKAN) "Suka Maju" Dalam memberdayakan Anggotanya Melalui Usaha Budidaya Ikan Lele (*Studi Deskriptif Pada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) "Suka Maju" di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi*)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Mei 2010

Yang menyatakan,

Dian Eko Saputro
NIM. 040910301132

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ✧ Ayahanda Bpk. Paidi dan Ibunda Sulasih tercinta yang tiada pernah sunyi akan do'a untuk keberhasilan ananda.
- ✧ Kekasihku Vina Tri W, yang tiada henti menasehati dan memberikan motivasi dengan ketulusan hati demi keberhasilan dan kebahagiaanku, semoga selalu diberi kemudahan dan selalu dalam ridho-Nya.
- ✧ Intan Adikku tercinta, jadilah kamu anak bangsa dan agama yang berbakti dan berbudi serta taat kepada orang tua.
- ✧ Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan, “tetep semangat dan sambut hari esok penuh keceriaan, Key..!!!
- ✧ Adik-adikku, SEMANGAT..! Wujudkan semua harapan dan cita-cita kalian...!!
- ✧ Teman-teman seperjuangan angkatan KS '04 yang, tetap berjuang kawan..!!
- ✧ Semua pono kawan dan bolo-bolo yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu, langkahku, langkah kita.
- ✧ Guru-guruku sejak TK sampai PT terhormat, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran, terima kasih.
- ✧ Almamater tercinta UNIVERSITAS JEMBER, jayalah engkau selalu.

MOTTO

Pergi dan temuilah masyarakatmu, hiduplah dan tinggallah bersama mereka, cintai dan berkaryalah bersama mereka.

Mulailah dari apa yang mereka miliki, buat rencana lalu bangunlah rencana itu dari apa yang mereka ketahui, sampai akhirnya, ketika pekerjaan usai, mereka akan berkata : '*Kamilah yang telah mengerjakannya*'.^{*)}

^{*)} Pepatah dari Pujangga Besar Cina, Lau Tze (dalam : *Materi Pelatihan Manajemen UPP Di Propinsi DIY; Tentang Model Pembinaan Kelembagaan Pokdakan Di Kabupaten Sleman*, Oleh Ir. A A Ayu Laksmidewi TP, MM)

RINGKASAN

Upaya Kelompok Budidaya ikan (POKDAKAN) "Suka Maju" Dalam memberdayakan Anggotanya Melalui Usaha Budidaya Ikan Lele(*Studi Deskriptif Pada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) "Suka Maju" di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi*), Dian Eko Saputro, 040910301132, 2010, 67 Halaman.

Kemiskinan sebagai masalah bersama tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan, akan tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. Program pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat miskin dapat dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan model pembangunan yang *bottom up* akan menciptakan suatu pembangunan yang kreatif yaitu pembangunan yang mampu memberikan ciri khas daerahnya sendiri sehingga daerah tersebut nantinya akan memiliki keunggulan yang kompetitif.

Pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan aktif berbagai komponen yang ada di masyarakat dapat dilakukan dengan optimalisasi berbagai potensi lokal yang ada di suatu daerah, baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang ada. Seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, untuk mencukupi kehidupan kesehariannya masyarakat setempat disamping mengandalkan dari hasil pertanian juga mengandalkan usaha budidaya ikan tawar dalam hal ini adalah "ikan lele".

Upaya meningkatkan produktifitas dan eksistensi masyarakat pembudidaya ikan dalam usaha budidaya ikan lele ini, masyarakat Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi membentuk sebuah kelompok pembudidaya ikan yang tergabung dalam Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) "Suka Maju", yang tentu saja dengan adanya lembaga budidaya tersebut dapat mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari lapisan masyarakat lebih khusus lagi adalah masyarakat

pembudidaya ikan lele yang ada di desa tersebut. Pokdakan “Suka Maju” ini dibentuk pada tanggal 25 September 2006, pada saat pembentukannya dihadiri oleh aparatur desa setempat, perwakilan Ormas, tokoh masyarakat (*stakeholder*), masyarakat pembudidaya ikan dan perwakilan dari masyarakat.

POKDAKAN “Suka Maju” yang dibentuk oleh masyarakat pembudidaya ikan lele yang ada di desa tersebut juga merupakan lembaga komunikasi antara pembudidaya dan juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan biasanya juga merupakan wadah untuk bisa mengajukan tambahan modal dari pemerintah setempat untuk penambahan modal usaha budidaya ikan lele.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjaga eksistensi dan produktifitas usaha budidaya ikan, masyarakat yang tergabung dalam Pokdakan Suka Maju Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pada tataran empiris anggota Pokdakan Suka Maju melakukan upaya pemberdayaan anggotanya melalui berbagai kegiatan dan model pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh anggota Pokdakan Suka Maju antara lain dengan melalui :

- a) Kumpulan rutin dan Arisan Anggota Pokdakan dan Pembudidaya Ikan;
- b) Mengikuti Seminar, Pelatihan dan Pembinaan seputar budidaya ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan kerjasama dengan aparatur Desa;
- c) Studi Banding pada Kelompok Budidaya Ikan lain;
- d) Penguatan Kelembagaan Kelompok Budidaya Ikan Pokdakan (Suka Maju) dengan menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pihak luar (*Channelling*).

**Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember**

SUMMARY

Pokdakan “Suka Maju” Effort In Empowerment Its Members By Catfish Cultivation. (Descriptive Study on Fish Farming Group (POKDAKAN) “Suka Maju” in Village Gambiran Wringinrejo Sub District Banyuwangi Regency), Dian Eko Saputro, 040910301132, 2010, 67 page.

Poverty as a shared problem can not be simply resolved by the government through various development policies, but also must be a shared responsibility for all development actors including the community itself. The development program is directed to the poor can be seen as an effort to meet the basic needs of food, clothing, shelter, education and health. With bottom-up model of development that will create a creative development is development that is able to provide its own country so typical of the area will have a competitive advantage.

Empowering communities with the active involvement of various components in the community can be done by optimizing the various local potentials that exist in a region, both human and resource potential of existing natural resources. As has been done by the village of Banyuwangi district Gambiran Wringinrejo District, to provide for the daily life of local communities in addition to relying on agricultural products also rely on the cultivation of freshwater fish in this case is “catfish”

Efforts to increase productivity and the existence of fish farmers in the cultivation of this catfish, the village of Banyuwangi regency Gambiran Wringinrejo District formed a group of fish farmers who are members of Fish Farming Groups (POKDAKAN), like it forward, which of course the existence of institutions such cultivation can be various accommodate the interests and aspirations of society is a society more specifically that there was catfish farmers in the village. Pokdakan “Suka Maju” was formed on September 25, 2006, at the time of its formation was attended by local village officials, representatives of community organization, community leaders (stakeholders), community fish farmers and representatives from the community.

POKDAKAN “Suka Maju” communities formed by catfish farmers in the village is also the agency of communication between the farmers and also as a vessel to accommodate the aspirations and usually also a container to be able to submit additional capital from local governments for additional capital catfish farming.

Results showed that in maintaining the existence and productivity of fish farming, the community incorporated in Suka Maju Pokdakan Wringinrejo Village, District Gambiran, Banyuwangi regency made various efforts of community empowerment. At the empirical level Suka Maju Pokdakan member empowerment efforts its members through various activities and community empowerment model. The empowerment activities that have been carried out by members of Suka Maju Pokdakan among others through: a) the routine collection and Arisan Member Pokdakan and fish farmers; b) Following the Seminar, Training and Development

about fish farming from the Office of Marine and Fisheries in cooperation with village officials; c) Comparative Study on Fish Farming Group stated; d) Institutional Strengthening Pokdakan Fish Farming Group (Suka Maju) to build the partnership and cooperation with external institutions (Channeling).

Social Welfare Department, Social and Political Sciences Faculty, Jember University.



PRAKATA

Puji syukur alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Skripsi ini memilih judul : **Upaya Kelompok Budidaya ikan (POKDAKAN) "Suka Maju" Dalam memberdayakan Anggotanya Melalui Usaha Budidaya Ikan Lele (*Studi Deskriptif Pada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) "Suka Maju" di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi*)**. Kami menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun usaha untuk menyempurnakan sudah kami lakukan secara maksimal. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat, rasa terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs.Purwowibowo, Msi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. Partono M.Si, sebagai pembimbing dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, terima kasih atas motivasi dan bimbingan yang telah diberikan.
4. Segenap dosen dan asisten dosen serta karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Kawan-kawan seperjuangan di Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan '04, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
6. Bapak Didit S. Dan segenap anggota Pokdakan Suka Maju Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi yang telah banyak membantu peneliti dalam proses penelitian.

7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis sendiri dan umumnya kepada para pembaca. Amien.

Jember, Juni 2010

Penulis

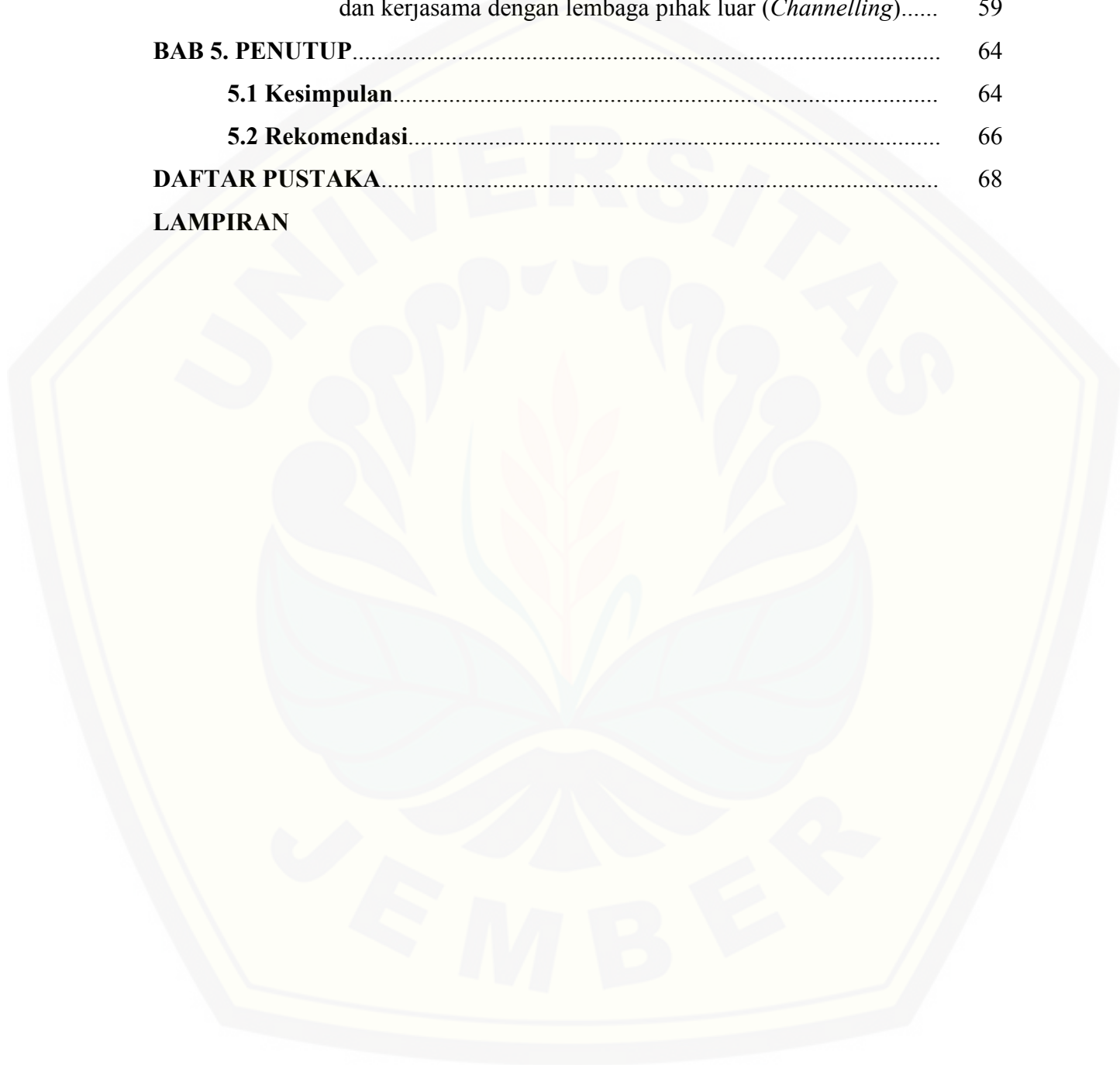


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pokok Bahasan	10
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kerangka Teori	14
2.1.1 Pemberdayaan.....	14
2.1.2 Community Organization dan Community Development.....	22
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Metode Penelitian	29
3.2 Metode Penentuan Lokasi Penelitian	29

3.3 Penentuan Informan	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4.1 Observasi.....	31
3.4.2 Wawancara Mendalam.....	33
3.4.3 Dokumentasi	33
3.5 Metode Analisa Data	34
BAB 4. PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Wilayah.....	36
4.1.2 Legenda Desa.....	38
4.1.3 Kondisi Sosial Budaya.....	39
4.1.4 Luas Wilayah dan Penggunaan Tanah	41
4.1.5 Komposisi dan Jumlah Penduduk.....	42
4.1.6 Pendidikan.....	46
4.1.7 Mata Pencaharian.....	47
4.2 Profil Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) “Suka Maju” ...	48
4.2.1 Profil Pokdakan “Suka Maju”.....	48
4.2.2 Struktur Organisasi.....	49
4.2.3 Proses Pemeliharaan lele oleh Pembudidaya Ikan Pokdakan Suka Maju, Desa Wringinrejo.....	49
4.3 Kegiatan Pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) “Suka Maju”	52
4.3.1 Kumpulan rutin dan Arisan Anggota Pokdakan dan Pembudidaya Ikan.....	52
4.3.2 Mengikuti Seminar, Pelatihan dan Pembinaan Seputar Budidaya Ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kerjasama dengan aparaturnya Desa.....	55
4.3.3 Studi Banding pada Kelompok Budidaya Ikan lain.....	58

4.3.4 Penguatan Kelembagaan Kelompok Budidaya Ikan Pokdakan (Suka Maju) dengan menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pihak luar (<i>Channelling</i>).....	59
BAB 5. PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Rekomendasi	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Penggunaan Tanah Desa Wringinrejo.....	41
4.2 Jumlah Penduduk Desa Wringinrejo.....	42
4.3 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur.....	43
4.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wringinrejo.....	44
4.5 Prasarana Pendidikan Formal Desa Wringinrejo Tahun 2009.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelompok Budaya Ikan “Sukamaju”..... 49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian dari Sukamaju
- Lampiran 3. Berita Acara Pembentukan Kelompok Sukamaju
- Lampiran 4. Struktur Organisasi
- Lampiran 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
Desa Wringinrejo Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi Tahun 2009-2013
- Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah Negara yang Sedang Berkembang (NSB) banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks untuk ditangani yang terkadang hal ini menjadi sebuah penghambat bagi perkembangan negara untuk maju menuju tahap selanjutnya. Salah satu permasalahan yang menjadi prioritas perhatian dari pemerintah adalah kemiskinan, hal ini pun sangatlah berpengaruh besar terhadap perkembangan negara. Tingkat perkembangan jumlah penduduk yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang mengikutinya mesti dijadikan pemicu bagi kelancaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukannya menjadi faktor penghambat.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun belum menampakkan hasil yang optimal. Sebagai permasalahan bersama, kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang tidak hanya dialami oleh negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia namun juga bagi negara maju yang telah memiliki keamanan dalam bidang ekonomi, hal itu terbukti dengan adanya krisis ekonomi global yang berawal dari anjloknya perekonomian di Amerika Serikat. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial yang dihadapi oleh semua negara di dunia, lebih-lebih di negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Sampai tahun 2007, Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen), turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta (dari 11,91 juta pada Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada Maret 2010), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang (dari 20,62 juta pada Maret

2009 menjadi 19,93 juta pada Maret 2010). Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Pada Maret 2009, 63,38 persen penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sedangkan pada Maret 2010 sebesar 64,23 persen. BPS memperkirakan hampir 17,4 % dari total penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi miskin. (www.worldpress.co.id, dalam *feminisasi kemiskinan dalam kultur patriarki*, diakses tanggal 25 April 2009).

Secara umum Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi alam yang cukup besar. Mulai dari lahan pertanian, perkebunan dan kawasan pantai yang membentang luas. Di tengah tingginya potensi pertanian itu, jumlah penduduk miskin justru terus bertambah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi mencapai 154.000 KK atau sekitar 460.000 jiwa. Total keseluruhan penduduknya berjumlah 1,6 juta jiwa. Jika dihitung secara kasar, angka kemiskinannya masih relatif tinggi atau sekitar 28,75%. Jumlah ini begitu ironis jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Banyuwangi. Secara umum, kemiskinan di Banyuwangi dipicu oleh kondisi perekonomian nasional. Namun, lemahnya sumber daya manusia (SDM) kian memperparah angka kemiskinan itu. Penduduk miskin hampir menyebar di seluruh kecamatan dari 24 kecamatan yang ada. Akibat lemahnya SDM, angka pengangguran ikut melambung. Jumlahnya mencapai 34.000 jiwa.

Penanggulangan kemiskinan perlu menjadi agenda kebijakan penting karena secara moral pemerintah harus mengemban tanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang secara eksplisit memberi amanat kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara. Oleh karena itu jika pemerintah melalaikan masalah kemiskinan berarti pula pelanggaran terhadap konstitusi (Muhadjir, 2005: 183). Disamping itu, saat ini penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan menjadi suatu keharusan bagi pemerintah, karena hal ini sudah menjadi komitmen global sejak dilaksanakan konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2000 yang telah menelorkan Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) untuk mencapai kesejahteraan penduduk tahun 2015.

MDGs telah menelorkan delapan butir kesepakatan yang meliputi: 1. memberantas kemiskinan dan kelaparan; 2. mencapai pendidikan dasar yang universal (pendidikan untuk semua); 3. mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. mengurangi jumlah kematian anak; 5. meningkatkan kesehatan ibu; 6. memerangi HIV/AIDS dan penyakit lainnya; 7. menjamin kelestarian lingkungan; dan 8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Muliawan, 2007:12). Dari kedelapan kesepakatan ini masalah kemiskinan serta gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian didalamnya. Oleh karena itu, kesepakatan ini merupakan salah satu tantangan global bagi pemerintah Indonesia pada umumnya untuk bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2015.

Masih terjadinya kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk ikut serta dalam seluruh tahap pembangunan.

Kemiskinan sebagai masalah bersama tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan, akan tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. Program pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat miskin dapat dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Untuk dapat merencanakan program pembangunan sektoral yang holistik diperlukan suatu metode penentuan sasaran yang mapan. Oleh karena itu, pengembangan informasi yang berkaitan dengan profil penduduk miskin dan wilayah miskin harus dapat digunakan sebagai dasar penentuan sasaran secara tepat dan terarah.

Sementara itu, Otonomi Daerah membawa konsekuensi adanya penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Daerah harus mengetahui segala potensi yang dimiliki serta lihai mengelolanya sehingga mampu melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan yang lebih banyak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pembangunan bisa mengarah pada pengelolaan secara *bottom up*. Dengan demikian Pemerintah daerah bukan lagi sekedar operator pembangunan, tetapi juga sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator.

Dengan pengelolaan yang *bottom up* akan menciptakan suatu pembangunan yang kreatif yaitu pembangunan yang mampu memberikan ciri khas daerahnya sendiri sehingga daerah tersebut nantinya akan memiliki keunggulan yang kompetitif. Namun di lain pihak, anggaran pembangunan yang tersedia terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan dimana penyusunannya berdasarkan kriteria yang terukur dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menunjang implemementasi program pembangunan tersebut. Pembangunan partisipatif itu sendiri menurut Adi (2003:25), mengemukakan bahwa :

Secara sederhana pembangunan partisipatif sering disebut sebagai model pembangunan yang menerapkan konsep partisipasi, yaitu pola pembangunan yg melibatkan semua pihak (pelaku) dalam proses pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka yang terkena pembangunan.

Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa pembangunan partisipatif berupaya untuk melibatkan semua komponen yang ada di masyarakat. Adapun alasan konsepsional tentang pembangunan partisipatif itu sendiri menurut Adi (2003 : 33) menyebutkan bahwa :

(1) Manusia pada dasarnya adalah unik & merdeka sehingga kebahagiaan seseorang tidak dapat ditentukan oleh pihak lain. (2) Tidak dilibatkannya manusia sebagai pribadi yang unik & merdeka bukan hanya sebagai sumber data telah melahirkan model pembangunan yang justru menghancurkan aspek manusiawi manusia.

Sedangkan alasan praktisnya adalah :

(1) Belajar dari pengalaman yang lalu dimana banyak proyek gagal/mubadzir oleh sebab kurang dilibatkannya warga dalam kedudukan yang setara sehingga tidak terjadinya persamaan pemahaman. (2) Tidak diakuinya posisi warga sebagai pemilik telah melemahkan rasa kepemilikan warga yg pada gilirannya telah menghambat keberlanjutan pembangunan (*sustainability*).

Seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya pelibatan berbagai komponen yang ada didalam masyarakat dalam proses pembangunan yang memandang bahwa manusia adalah jiwa unik dan merdeka. Harapan yang muncul kemudian adalah dengan adanya partisipasi aktif dan pelibatan berbagai komponen yang ada dimasyarakat maka akan memposisikan masyarakat bukan hanya sebagai objek dari pembangunan melainkan mengkondisikan masyarakat juga sebagai subjek atau pelaku dalam pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat akan lebih memiliki dan tentunya lebih bertanggungjawab terhadap upaya pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan aktif berbagai komponen yang ada di masyarakat dapat dilakukan dengan optimalisasi berbagai potensi lokal yang ada di suatu daerah, baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang ada. Seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, untuk mencukupi kehidupan kesehariannya masyarakat setempat mengandalkan hasil yang diperoleh dari budidaya ikan tawar dalam hal ini adalah “ikan lele”. Dari kegiatan budidaya ikan

yang ditekuni oleh masyarakat setempat mulai 2004 lalu oleh masyarakat setempat dirasakan sangat membantu dalam perekonomian mereka.

Usaha budidaya perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai potensi dan peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Pembangunan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Peranan sektor perikanan dalam pembangunan nasional dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyedia bahan baku pendorong agroindustri, penyumbang devisa melalui penyedia ekspor hasil perikanan, penyedia kesempatan kerja, sumber pendapatan nelayan atau petani ikan dan pembangunan daerah, serta pendukung kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan hidup.

Pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya telah banyak dikembangkan karena perikanan budidaya diharapkan dapat menjadi salah satu andalan utama dalam produksi ikan. Salah satu sektor perikanan yang memiliki peluang pasar yang cukup baik adalah budidaya ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu komoditi perikanan air tawar yang banyak diminati oleh masyarakat, baik oleh konsumen maupun para pembudidaya. Oleh konsumen, ikan lele banyak disukai karena rasanya yang lezat dan gurih, sedangkan oleh para pembudidaya, perawatan ikan lele relatif lebih mudah dibanding dengan ikan tawar, waktu yang dibutuhkan untuk budidayapun lebih singkat dari pada ikan tawar lainnya, ikan lele hanya membutuhkan waktu sekitar 70-80 hari untuk bisa memanen, hal itu merupakan waktu yang relatif lebih singkat dari pada ikan tawar lainnya seperti gurami yang membutuhkan waktu sekitar 165 hari. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air Tawar yang sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia terutama di Pulau Jawa. Budidaya lele berkembang pesat dikarenakan 1) dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas dengan padat tebar tinggi, 2) teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat, 3) pemasarannya relatif mudah dan 4) modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah. (Dahuri, 2003:54).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi masyarakat desa setempat menekuni usaha budidaya ikan tawar dalam hal ini adalah lele. Masyarakat desa Wringinrejo memulai usaha budidaya ini pada tahun 2004. Pada awalnya di desa ini masyarakatnya merupakan petani, pada saat musim penghujan sawah-sawah yang ada ditanami padi dan ketika musim kemarau biasanya ditanami berbagai tanaman polowijo seperti ketela pohon, lombok, tomat, brambang dan yang lainnya.

Menurut penuturan salah satu warga setempat, Kamsidi yang juga merupakan pembudidaya ikan lele yang ada di desa Wringinrejo, kamsidi memulai menekuni budidaya ini mulai tahun 2005, ia menuturkan bahwa “usaha memelihara ikan lele itu hasilnya lebih besar dari pada ditanami padi, karena ikan lele Cuma jangka waktu 90 hari sudah bisa dipanen dan merawatnyapun *gampang* (mudah)”.

Budidaya ikan lele di masyarakat Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi merupakan jenis usaha baru yang ada di desa setempat, dimana baru 6 tahun ini berlangsung. Dan sekarang para pembudidaya ikan lele sudah mempunyai Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN). POKDAKAN sendiri mempunyai anggota 15 anggota. Informasi yang berhasil di dapat oleh peneliti bahwa yang pertama kali memulai usaha budidaya ikan lele adalah Didit Sudariyanto, yang sekarang juga sebagai Ketua Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) Sukamaju di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Didit menuturkan bahwa :

“pada pertengahan tahun 2004, saya coba mengembangkan budidaya ikan air tawar. Waktu itu saya membeli bibit ikan gurami di Dinas Perikanan Banyuwangi, kemudian tahun 2005 saya membeli bibit lele dan ternyata hasilnya lebih *gede* (besar). Lele ini cepat proses pembesarannya dan harga jual di pasaran lokal maupun di luar daerah cukup lumayan. Ada sekitar ribuan ekor bibit yang sudah dihasilkan dari induk ikan yang kita beli untuk proses pembibitan ikan lele di sini. Yang kemudian banyak warga sini yang mengikuti budidaya lele”

Seperti uraian di atas, Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu desa yang sebagian warganya menekuni dunia budidaya ikan tawar dalam hal ini adalah ikan lele. Masyarakat desa setempat menganggap bahwa kegiatan budidaya ikan lele sangat mendukung dalam perekonomian keseharian mereka. Di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi itu juga sudah terbentuk Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN), yang tentu saja dengan adanya lembaga budidaya tersebut dapat mengkomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari lapisan masyarakat lebih khusus lagi adalah masyarakat pembudidaya ikan lele yang ada di desa tersebut. POKDAKAN yang dibentuk oleh masyarakat pembudidaya ikan lele yang ada di desa tersebut juga merupakan lembaga komunikasi antara pembudidaya dan juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan biasanya juga merupakan wadah untuk bisa mengajukan tambahan modal dari pemerintah setempat untuk penambahan modal usaha budidaya ikan lele.

Bertolak dari beberapa fenomena tersebut, Kami mengangkat masalah tersebut ke dalam suatu kegiatan penelitian, yang dalam hal ini kami beri judul: “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Tawar (Studi Deskriptif-Interpretatif pada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi). Adapun korelasi judul dengan disiplin keilmuan Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah bahwa dalam penelitian ini akan berusaha untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dilakukan pada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) “Suka Maju” dan mengkaji berbagai upaya pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Adapun pada tataran yang lebih aplikatif, dalam upaya pengidentifikasian yang berusaha untuk menemukan berbagai kegiatan yang ada di POKDAKAN “Suka Maju” kemudian akan mendeskripsikan serta menggali lebih lanjut tentang berbagai kemungkinan pada aktifitas keseharian para pembudidaya ikan tawar yang ada di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Upaya munculnya kemandirian dan peningkatan kesejahteraan anggota Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) yang ada Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi merupakan fenomena menarik untuk diamati dan dikaji lebih mendalam karena diharapkan akan semakin menambah khazanah dan memperkaya kajian dalam disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Dimana lebih spesifik dalam kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah adanya kajian tentang Community Development dan Community Organization. Sebuah upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan upaya partisipatif yang berorientasi pada munculnya masyarakat yang berdaya dan mandiri. maka berdasarkan uraian di atas kami dapat mendeskripsikan serta menggali tentang berbagai kemungkinan dan aktifitas keseharian para pembudidaya ikan tawar sehingga dalam penelitian ini kami dapat memadukan berbagai teori dalam satu bidang ilmu dan atau lintas bidang ilmu, terutama bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Hal itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai potensi lokal yang ada di daerahnya.

Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. pemberdayaan masyarakat

tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pengembangan kemampuan diri mereka.

Seperti paparan di atas bahwa pemberdayaan bisa dilakukan disamping dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih lanjut akan membentuk sebagai modal sosial, modal lain yang sangat berperan penting adalah adanya optimalisasi berbagai potensi lingkungan yang ada. hal itu seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang telah menekuni dunia budidaya ikan tawar. Kegiatan budidaya ikan tawar disini dirasa sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mendukung berbagai aktifitas dan meningkatkan produktifitasnya sebagai pembudidaya ikan tawar dalam hal ini adalah ikan lele. Pada tataran lebih lanjut para pembudidaya ikan lele ini mengorganisir diri dalam sebuah wadah organisasi yang mereka beri nama Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) “Suka Maju” yang mulai berdiri pada tahun 2006. Harapan para masyarakat yang menekuni budidaya ikan tersebut adalah dengan adanya POKDAKAN diharapkan akan lebih meningkatkan efektifitasnya dan keberlangsungan dari kegiatan budidaya yang ditekuninya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah upaya POKDAKAN “ Suka Maju” dalam memberdayakan anggotanya melalui pengembangan usaha budidaya ikan lele?

1.3 Pokok Bahasan

Pemberdayaan masyarakat menekankan partisipasi masyarakat untuk menemukan masalah sendiri, mengatasi dengan program kerja yang sesuai dan mengatur penyelenggaraan untuk keberlanjutannya. Mubyanto (1994:36) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Selanjutnya partisipasi ini dibedakan atas partisipasi kolektif dan partisipasi individu. Menurut Ndraha (1997:26) bahwa partisipasi masyarakat didorong melalui, yaitu: (1) Proyek pembangunan bagi masyarakat desa yang dirancang sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat (2) Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat (3) Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

Seperti pendapat di atas bahwa keberadaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan diyakini akan mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, jadi untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas mengorganisir diri merupakan cara yang dibutuhkan, karena hal tersebut bisa menjadi wadah untuk berpartisipasi di tingkat kelompok. Hal itu sesuai yang ada pada masyarakat Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang menekuni kegiatan budidaya ikan lele. Masyarakat desa setempat mengorganisir diri dengan membentuk Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) “Suka Maju”. Melalui wadah POKDAKAN tersebut harapannya masyarakat akan lebih dapat meningkatkan partisipasi anggota kelompok akan saling belajar melalui pendekatan *learning by doing* (belajar sambil bekerja) menuju pada tujuan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

Keberadaan POKDAKAN “Suka Maju” diharapkan dapat menjadi media perubahan pengetahuan kearah yang lebih baik, ketrampilan maupun sikap yang merupakan potensi untuk pembangunan yang pada akhirnya terbentuknya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik. Karena pada dasarnya keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) akan sangat mempengaruhi terhadap produktifitas dan eksistensi masyarakat dalam menciptakan keberlanjutan keberdayaan (*sustainable development*). Pada tataran lebih lanjut maka Sumber Daya Manusia akan menjadi modal sosial (*social capital*) dalam proses pemberdayaan itu sendiri. Adapun modal sosial menurut Adapun modal sosial menurut Hasbullah (2006:57), mengatakan bahwa :

Modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi

untuk mendapatkan sumberdaya baru. Seperti yang diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan dan dikonsumsi, disimpan dan diinvestasikan.

Disamping modal sosial, modal lain yang juga mendukung eksistensi masyarakat dalam upaya pemberdayaan dan meningkatkan taraf hidupnya adalah adanya modal lingkungan (*environmental capital*). Keberadaan lingkungan yang baik maka akan berdampak positif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kondisi lingkungan yang mendukung maka hal tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Karena ketika lingkungan terpelihara dengan baik maka akan dapat dijadikan sebagai modal lingkungan dalam melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan yang partisipatif dalam masyarakat setempat. Hal itu sesuai dengan pendapat Adi (2007 : 45-46) yang mengemukakan bahwa :

Salah satu modal yang mempunyai nilai penting dalam suatu perencanaan partisipatif adalah adanya modal lingkungan (*Environmental Capital*) yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Modal lingkungan ini dapat juga berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, serta mempunyai nilai yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup dari manusia dan makhluk hidup lainnya.

Modal lingkungan (*environmental capital*) seperti yang diungkapkan diatas mempunyai nilai yang sangat penting, sehingga optimalisasi berbagai potensi yang ada lingkungan di mana tempat masyarakat berada. Begitu juga yang ada di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi lingkungan yang sangat besar dimana di desa ini mempunyai tanah dan kondisi alam yang sangat mendukung untuk dikembangkannya usaha budidaya ikan tawar, dalam observasi awal yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa telah munculnya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk memanfaatkan berbagai potensi lingkungan yang ada di desa tersebut, hal itu terbukti dengan semakin berkembangnya usaha budidaya ikan tawar dalam hal ini adalah ikan lele dan bahkan masyarakat setempat mengorganisir diri dengan cara membentuk sebuah Padepokan Budidaya Ikan (POKDAKAN) “Suka

Maju” yang harapannya adalah dengan adanya lembaga tersebut di samping bisa menampung berbagai aspirasi masyarakat setempat juga menjadi media dalam melakukan pengembangan dan pengusulan untuk penambahan modal untuk budidaya ikan tawar yang mereka geluti kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemkab Banyuwangi, ataupun berbagai instansi yang lain.

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian hendaknya mempunyai tujuan yang jelas dan tegas. Jika tidak ada tujuan yang jelas maka seorang peneliti akan mengalami hambatan dalam pengumpulan data, sehingga terjadi penyimpangan yang membuat penelitian tersebut tidak relevan lagi. Menurut Hadi (*dalam* Koentjaraningrat 1993:43) secara umum kegiatan penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut :

“Suatu research dalam ilmu empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu dalam mengisi kekosongan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih jauh atau lebih luas apa yang sudah ada dan menguji kebenaran dilakukan jika yang sudah ada atau masih menjadi diragukan kebenarannya”.

Sejalan dengan pendapat di atas Bungin (*dalam* Sugiyono, 1997:43) mengemukakan pendapatnya bahwa tujuan penelitian dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas, tegas, dan bereksplisit. Tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk memahami fenomena sosial. Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: berusaha untuk mengidentifikasi, mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) “Suka Maju” yang ada di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam memanfaatkan potensi lokalnya.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari suatu penelitian diharapkan mempunyai manfaat berdasarkan dari hasil penelitian. Dalam hal ini manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial pada khususnya.
2. Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang aktifitas kehidupan dan kegiatan para pembudidaya ikan yang tergabung dalam Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) “Suka Maju” yang ada di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.
3. Diharapkan Dapat dijadikan bahan acuan dan bahan informasi tambahan bagi peneliti lainnya yang mengambil tema sama dengan harapan dapat dilakukan penelitian lanjutan atau pengembangan dari penelitian ini.
4. *Diharapkan dapat menjadi Bahan untuk menyusun sistem perencanaan dan koordinasi secara partisipatif yang terkait dengan pengembangan ekonomi produktif pada pembudidaya ikan tawar yang ada di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.*

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Agar suatu penelitian yang dilakukan dapat memenuhi standar ilmiah dan dapat menjamin kevaliditasnya sehingga menjadi suatu karya ilmiah yang baik, tentu haruslah menyertakan kerangka teori yang dipandang relevan untuk membantu memahami dan menjelaskan suatu fenomena yang diteliti. Adapun alasan mengapa kerangka teori digunakan dan dianjurkan dalam suatu penelitian, seperti yang disampaikan oleh Abdul Aziz SA.R (*dalam* Sugiono 2004:45), mengemukakan bahwa :

Pertama, dengan memberi teori seorang peneliti dapat menyajikan kerangka konseptual penelitian berikut memberikan penjelasan alasan kuat dari sisi teori, tentang pentingnya penelitian ini dilakukan; kedua, dapat membantu mengembangkan wawasan intelektual dalam membangun pertanyaan penelitian secara mendasar dan tajam; ketiga, dapat memberikan suatu keyakinan dan kemantapan bahwa di aras abstrak penelitian yang dilakukan menemukan relevansi logika dengan teori tertentu.

Oleh karena itu, adanya kerangka teori sangat diperlukan guna memperjelas arah penelitian yang dilakukan. Pada tinjauan pustaka ini diawali dengan adanya kajian tentang pemberdayaan.

2.1.1 Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan senantiasa selalu hadir dalam konteks hubungan sosial antar manusia dan tercipta melalui hubungan itu. Karena itulah kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemaknaan kekuasaan yang seperti ini, maka pemberdayaan itu merupakan suatu proses perubahan yang kemudian memiliki

konsep yang bermakna. Hal ini selaras dengan pengertian pemberdayaan yang dikemukakan oleh Parson, (*dalam* Edi Suharto, 2002:32) yang menyatakan bahwa:

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut Suharto (2002:58), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan; (c) berpartisipasi pada proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Selanjutnya Suharto (2003:59) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan dikatakan sebagai sebuah *proses* adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sedangkan sebagai *tujuan*, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, ekologi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Adapun tujuan utama dari pemberdayaan secara esensial adalah memperkuat dan menciptakan kesadaran dalam masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal. Dengan kata lain upaya pemberdayaan masyarakat itu mempunyai tujuan

untuk menciptakan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan meningkatkan usaha yang ada melalui pendampingan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.

Selain itu, ada dua pandangan yang berkembang mengenai keberadaan pemberdayaan. *Pertama* pemberdayaan dilihat sebagai suatu proses. Pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses adalah proses berkesinambungan. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Hogan (*dalam* Isbandi R. Adi, 2003:83) yang melihat proses pemberdayaan individu sebagai proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti suatu masa saja. Hal ini tentu saja berlaku juga dalam masyarakat dimana suatu komunitas pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun lembaga non pemerintah. Pemberdayaan akan terus berlangsung selama komunitas masih tetap ada dan man berusaha untuk memberdayakan dirinya. *Kedua* pemberdayaan dilihat sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditentukan waktunya. Adapun konsekuensi pemberdayaan sebagai suatu program adalah apabila program maka pemberdayaan pun dianggap sudah selesai.

Kerangka pikir dalam proses pemberdayaan setidaknya mengandung tiga tujuan penting (Mujiyadi, 2000:36), mengemukakan bahwa :

Pertama menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Kedua* memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan, melalui peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, serta peningkatan akses terhadap kemajuan. *Ketiga* upaya melindungi atau mencegah persaingan tyang tidak seimbang, menciptakan keadilan serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antar yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Pemberdayaan ekonomi yang berakar pada rakyat dan menuju kemandirian rakyat;
- b. Tata sosial yang berkeadilan dan memihak rakyat;
- c. Pengembangan SDM yang berkualitas;

- d. Kelembagaan yang dimiliki masyarakat dari, oleh, dan untuk rakyat;
- e. Tata politik yang demokratis dan partisipatif;
- f. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat tentunya menekankan pada suatu proses kesadaran dengan pembentukan kapasitas melalui partisipasi yang lebih besar. Menurut Adi (2003:166) masalah mensinergikan berbagai upaya pemberdayaan yang ada inilah salah satu hal yang paling sulit dalam melaksanakan pembangunan sosial maupun pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada rakyat. Sebagai suatu strategi pemberdayaan memandang pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kontrol internal atas sumber daya material maupun non-material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan, yang memandang inisiatif-kreatif dari rakyat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang akan dicapai proses pembangunan. Korten (*dalam* Abdurrachman, 2000:32) menyatakan bahwa ada tiga dasar perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu sebagai berikut:

- 1) memusatkan pikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga, dan komunitas;
- 2) mengembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swaorganisasi;
- 3) mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara territorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah kepemilikan dan pengendalian lokal.

Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang tentunya memberikan peluang bagi

masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa agar esensi pemberdayaan tidak terdistorsi.

Untuk itu, pemahaman terhadap faktor-faktor determinan sistem pembangunan (ekonomi, politik, dan sosial budaya) dari tingkat makro (nasional), meso (regional) sampai mikro (lokal) menjadi sangat penting (Abdurrachman, 2000:41). Selanjutnya dilakukan langkah-langkah strategis restrukturisasi sistem pembangunan yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penanganan setiap permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Faktor-faktor determinan sistem sosial budaya menjadi landasan untuk mengawali dan inheren dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan, konsistensi masyarakat, proses pemecahan masalah serta melalui pemberdayaan sampai terbentuknya aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi masyarakat.

Upaya pemberdayaan kesadaran lingkungan terhadap komunitas atau masyarakat pembudidaya ikan lele dapat dilakukan dengan penggunaan strategi pemberdayaan yang mempunyai implikasi agar setiap kegiatan yang diciptakan bertumpu pada proses yang sifatnya partisipatif (terakomodasinya aspirasi, terbuka pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat). Kondisi ini dapat ditunjukkan dengan indikator aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi masyarakat.

Menurut Abdurrachman (2000:32) mengatakan bahwa aktualisasi diri merupakan ekspresi diri setiap anggota komunitas dalam proses pengambilan keputusan, baik pada tahap dialog, penemuan dan pengembangan untuk program selanjutnya. Sedangkan koaktualisasi eksistensi merupakan perilaku yang menunjukkan bahwa adanya aktualisasi bersama dalam komunitas yang berimplikasi pada eksistensi komunitas dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungannya. Untuk itu, konsep pembangunan sosial yang tepat adalah dengan menggunakan metode pemberdayaan yang partisipatif.

Latar belakang pemikiran partisipatif adalah program, proyek atau kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari “atas” atau dari “luar” komunitas sering

kali gagal dan tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Kondisi ini memunculkan bahwa perlu suatu reorientasi terhadap strategi pembangunan masyarakat yaitu dengan memunculkan atau mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat.

Paradigma pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat merupakan keinginan agar hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai tetap herkelanjutan. Mengutip pendapat dari Pretty dan Guijt (*dalam* Ndraha, 1997:63) bahwa:

Pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran, disamping bantuan pembangunan. Ringkasnya, diperlukan suatu paradigma baru.

Munculnya paradigma pembangunan partisipatoris mengindikasikan adanya dua perspektif, *pertama* pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan dan perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program yang mewarnai kehidupan mereka, sehingga dengan dernikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan, secara penuh, *kedua* adalah membuat umpan balik (*feedback*) yang pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan.

Pemberdayaan partisipatif tentu menekankan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam, maupun dari sumber daya sosial dan budaya yang mereka miliki. Masyarakat memiliki kemampuan yang bisa digali dan disalurkan menjadi energi yang besar untuk mengentaskan ketidakberdayaan mereka. Cara menggali dan mendaya-gunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yang menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Abdurrachman (2000:55) mengatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan, ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti:

- 1) perumusan konsep;
- 2) penyusunan model;
- 3) proses perencanaan;
- 4) pelaksanaan gerakan pemberdayaan;
- 5) pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan;
- 6) pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Didalam pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif. Konsep ini bersesuaian dengan yang diungkapkan oleh Abdurrachman (2000:57) bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat, dengan strategi pokok memberi “*power*” kepada masyarakat.

Untuk merumuskan rencana-rencana serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya membutuhkan suatu pemahaman dari masyarakat sendiri dalam memahami kebutuhan mereka. Hal ini, bersesuaian dengan Abdurrachman (2000:60) bahwa masyarakat memahami kebutuhan dan permasalahan yang harus diberdayakan agar mereka mampu dalam mengenali kebutuhan-kebutuahnya. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan pemberdayaan harus selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara bertahap, ajeg dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi masyarakat adalah semangat solidaritas sosial dan merupakan hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral bersama, kepercayaan bersama dan cita-cita bersama.

Untuk itu, pengorganisasian masyarakat cara yang tepat dalam melakukan kajian pemberdayaan terhadap masyarakat yang orientasikan pemberdayaan komunitas yang berbasis pada nilai-nilai luhur kemanusiaan yang bersifat universal, yakni terutama keiklasan, kejujuran, dan dapat dipercaya. Untuk memenuhi penyiapan pengorganisasian masyarakat, kerangka pemecahan yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- 1) upaya pemberdayaan harus berorientasi pada kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
- 2) penciptaan pendckatan berbasis kebutuhan dan prakarsa masyarakat dan

pengorganisasian masyarakat yang pada gilirannya diharapkan mampu menjadi sarana bagi masyarakat untuk membangun kembali ikatan sosial dan kapital sosial;

- 3) proses pengorganisasian masyarakat pada prinsipnya dilakukan dengan mengorganisir pimpinan-pimpinan warga yang representatif dan dapat dipercaya yang dipilih secara langsung oleh warga;
- 4) proses pendampingan atau fasilitasi masyarakat dalam memutuskan sendiri kebutuhan dan rencana, dilakukan melalui musyawarah dan penyepakatan bersama, sehingga lebih terjamin azas keadilan dan kebersamaan yang pada gilirannya akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat;
- 5) untuk menjamin upaya pemberdayaan masyarakat, tentunya tidak saja benar-benar sesuai dengan harapan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tetapi juga sesuai dengan atau didukung dengan kebijakan pemerintah setempat, maka perlu dilakukan interaksi yang intensif dan sinergi antara masyarakat, pemerintah dan kelompok-kelompok yang peduli (*stakeholder*);
- 6) interaksi kemitraan yang sinergis antara masyarakat dengan pemerintah dan kelompok peduli dimaksudkan agar mampu mendorong proses pembelajaran masyarakat untuk mengakses berbagai sumber daya yang ada, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal, dan benar-benar bermanfaat, efektif, dan efisien.

Dalam melakukan pemberdayaan yang partisipatif, tentu dalam proses perencanaannya pun harus partisipatif juga, sebagai mana yang sudah dituliskan sebelumnya. Perencanaan partisipatif dapat dilaksanakan jika praktisi pembangunan tidak berperan sebagai perencana untuk masyarakat, tetapi sebagai pendamping dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat (Adi, 2002:102). Beberapa keterampilan dasar yang harus dimiliki untuk merencanakan kegiatan partisipatif, antara lain sebagai berikut:

- 1) Diskusi Kelompok Terarah / *Focus Group Discuss* (FGD).

Diskusi kelompok terarah digunakan untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi didalam masyarakat atau organisasi masyarakat, dengan kiat mendayagunakan potensi sosial dan penciptaan interaksi dengan sumber-sumber sosial. Adapun fokus perhatian yang diamati dalam proses dialog kelompok terarah ini adalah dalam rangka (1) persiapan untuk bekerja sama; (2)

pembentukan kemitraan; (3) artikulasi tantangan; (4) identifikasi kekuatan; (5) penentuan arah kegiatan.

2) Memfasilitasi Analisis Pola Keputusan

Analisis pola keputusan adalah gambaran yang menggambarkan arus penentu keputusan, serta dasar pertimbangan yang dipakai dalam pengambilan keputusan tersebut. Adapun fokus perhatian mengamati proses penemuan yang dilakukan bersama antara pendamping dengan masyarakat adalah dalam hal: (1) eksplorasi sistem sumber; (2) analisis kapasitas sumber; (3) penyusunan kerangka pemecahan masalah.

Untuk itu dalam menciptakan pembangunan sosial melalui pemberdayaan yang partisipatif dengan maksud untuk membangun kesadaran terhadap optimalisasi berbagai potensi yang ada di suatu wilayah tentunya peran masyarakat sangat diutamakan yang artinya bahwa masyarakat ditempatkan sebagai subjek (pelaku) bukan sebagai objek (sasaran) dalam berbagai kegiatan yang ada dalam upaya mewujudkan pemberdayaan yang partisipatif.

2.1.2 Community Organization dan Community Development

CO/CD pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial terencana yang profesional yang didesain untuk mengatasi masalah-masalah sosial atau memenuhi kebutuhan pada tingkat komunitas. Dalam ilmu kesejahteraan sosial CO/CD dikenal sebagai pendekatan dengan skala makro atau yang sering disebut dengan intervensi makro yang kaitannya dengan aspek yang lebih luas yaitu organisasi dan masyarakat. Lazimnya strategi CO/CD digunakan, sebagaimana *Community Organization* (CO) umumnya diterapkan pada masyarakat perkotaan, sedangkan *Community Development* (CD) penerapannya pada masyarakat pedesaan, namun ini bukan menjadi dikotomi persoalan penggunaan kemetodean antara kota dan desa. Kedua metode tersebut dapat dipakai secara bersamaan, tanpa harus menentukan kelayakan penggunaan kota atau desa.

Sebagai salah satu bentuk intervensi makro dengan ruang lingkup yang lebih luas yaitu keorganisasian dan masyarakat, menurut Glen (*dalam* Adi, 2003:165) didalam penggunaan pendekatan intervensi makro, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menjadi perhatian utama, sebagai berikut:

1. Mengembangkan layanan dan organisasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
2. Memaksimalkan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi;
3. Mendukung terciptanya kolaborasi antar beberapa organisasi guna memenuhi minat masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pengembangan organisasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menurut Glen (*dalam* Adi, 2003:169) dicirikan dengan komitmen lembaga yang secara utuh untuk kebutuhan lembaga dan kepuasan masyarakat. Hal ini berarti organisasi berusaha semaksimal mungkin “menghilangkan” batas dengan masyarakat, sehingga memunculkan anggapan bahwa proyek yang sedang dijalankan organisasi adalah proyek bersama dengan masyarakat.

Strategi dasar dalam pendekatan intervensi makro pada umumnya dilandasi pada upaya mengoptimalkan fungsi manajemen, yang mana fungsi manajemen itu sendiri terdiri dari berbagai macam. Namun, kaitannya dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga dalam hal ini, ada dua fungsi manajemen yang menjadi perhatian utama yaitu: (a) fungsi perencanaan; (b) fungsi pengawasan. Karena kedua fungsi ini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga, walaupun tanpa mengurangi arti penting fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi pengorganisasian, aktuasi, supervisi (Adi, 2003:174).

Untuk memberikan pemahaman mengenai fungsi perencanaan, dalam hal ini Skidmore (Adi, 2003:174) menyatakan bahwa suatu perencanaan diperlukan oleh suatu lembaga didasar beberapa alasan, yaitu terdiri dari (a) efisiensi; (b) keefektifan; (c) akuntabilitas; (d) moral. Sedangkan fungsi pengawasan dalam optimalisasi kinerja lembaga pada umumnya terkait dengan proses pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi.

a. Fungsi perencanaan

Dalam suatu proses perencanaan yang diperlukan oleh suatu lembaga terutama dalam hal ini adalah yang bersifat memberikan pelayanan terhadap masyarakat, ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian, sebagai berikut:

- 1) Efisiensi (*efficiency*). Adapun tujuan dasar dari efisiensi adalah usaha untuk mencapai tujuan dengan biaya dan upaya yang seminimal mungkin dengan hasil yang sebaik-baiknya. Tentu saja, hal ini baru bisa terjadi apabila dilakukan perencanaan yang juga merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya berbagai permasalahan didalam pelaksanaan nantinya.
- 2) Keefektifan (*effectiveness*). Menurut Lewis (dalam Adi, 2003:175) keefektifan diukur berdasarkan variabel-variabel kriteria yang diciptakan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan. Dengan berdasarkan pada kriteria ini petugas dapat menilai apakah suatu program tersebut sudah tepat guna atau tidak. Untuk itu, apakah suatu program sudah tepat guna atau belum tidak akan dapat tercapai apabila tidak dilakukan perencanaan terlebih dahulu.
- 3) Akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam suatu lembaga tentu dibutuhkan. Hal ini terkait dengan kinerja lembaga mengenai untuk siapakah suatu lembaga berjalan dan kepada siapakah lembaga tersebut bertanggungjawab? Apakah tanggungjawab tersebut untuk masyarakat, profesi atau lembaga sendiri atau yang lain-lain? Yang tentu saja akan sangat berpengaruh pada kinerja lembaga itu sendiri. Dengan perencanaan yang seksama, dimanapun pertanggungjawaban atau akuntabilitas mengarah tentu akan mengarahkan para tenaga profesional dalam mengoperasionalkan pekerjaan mereka.
- 4) Moral (*morale*). Setiap anggota atau staf dalam suatu lembaga tentu membutuhkan penyaluran kreatifitas, dan perasaan dalam mencapai sesuatu (*feeling of achievement*), serta kepuasan dalam upaya meningkatkan kinerja mereka. Tentu penyaluran ini dimaksudkan agar staf merasa bahwa keberadaannya benar-benar dihargai oleh lembaga, sehingga dapat

rnengembangkan ikatan emosional dan kebersamaan dengan para staf yang pada akhirnya dapat meningkatkan moral kerja para staf. Menurut Skidmore (Adi, 2003:177) perasaan para staf akan berpengaruh terhadap cara staf memberikan pelayanan terhadap klien.

b. Fungsi pengawasan

Seperti yang sudah dituliskan di atas fungsi pengawasan dalam suatu organisasi pada umumnya terkait dengan proses pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi (*Evaluation*). Istilah pemantauan (*monitoring*) dikenal juga dengan nama evaluasi proses, sedangkan untuk istilah evaluasi mempunyai dinamika makna yang berbeda. Bila istilah muncul bersama dengan pemantauan (*monitoring*), maka evaluasi yang dimaksud disini adalah evaluasi hasil. Pengertian yang kedua dari kata evaluasi adalah jika ia berdiri sendiri tanpa diikuti kata pemantauan, maka evaluasi disini dapat berarti evaluasi masukan (*input evaluation*), evaluasi proses (*process evaluation*) ataupun evaluasi hasil (*outcome evaluation*).

Selain itu, dijelaskan juga melalui statmentnya Feurstein (dalam Isbandi R. Adi, 2003:187) yang menyutakan ada sepuluh alasan mengapa evaluasi perlu dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian (guna melihat apa yang sudah dicapai);
- 2) Mengukur kemajuan (melihat kemajuan dikaitkan dengan objektif program);
- 3) Meningkatkan pemantauan (agar tercapainya manajemen yang lebih baik);
- 4) Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan (agar dapat memperkuat program itu sendiri);
- 5) Melihat apakah usaha sudah dilakukan secara efektif (guna melihat perbedaan apa yang terjadi setelah diterapkan suatu program);
- 6) Mengumpulkan informasi (guna merencanakan dan mengelola kegiatan program secara lebih baik);
- 7) Berbagi pengalaman (guna melindungi pihak lain terjebak dalam kesalahan yang sama atau untuk mengajak seseorang untuk ikut melaksanakan metode yang serupa bila metode yang dijalankan telah berhasil dengan baik);

- 8) Meningkatkan keefektifan (agar dapat memberikan dampak yang lebih luas);
- 9) Memungkinkan terciptanya perencanaan yang lebih baik (karena memberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, komunitas fungsional dan komunitas lokal).

Meskipun dari sepuluh alasan mengapa suatu organisasi perlu melakukan evaluasi, akan tetapi tidak semua alasan tersebut selalu muncul pada setiap kasus pengevaluasian. Menurut Adi (2003:188) yang menjadikan alasan kenapa suatu evaluasi dilakukan, karena kesepuluh alasan inilah yang sering muncul. Untuk itu terkait dengan kegiatan evaluasi, seperti yang sudah disinggung diatas, adapun untuk memberikan pemahaman mengenai tiga tipe evaluasi guna mengawasi suatu program secara lebih seksama menurut Ford dan Gilbert (dalam Adi, 2003:189), sebagai berikut:

1. *evaluasi input* memfokuskan pada berbagai unsur yang masuk dalam suatu pelaksanaan suatu program. Tiga unsur (variabel) utama yang terkait dengan evaluasi input adalah klien, staf dan program. Dalam kaitannya dengan evaluasi program, ada empat kriteria yang dapat dikaji, baik sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: (1) tujuan dan objektif; (2) penilaian terhadap kebutuhan komunitas; (3) standar dari suatu “praktek yang terbaik”; (4) biaya per unit layanan.
2. *evaluasi proses* memfokuskan diri pada aktivitas program yang melibatkan interaksi langsung antara klien dengan staf “terdepan” (*line staff*) yang merupakan pusat dari pencapaian tujuan (objektif) program. Tipe evaluasi ini diawali dengan analisis dari sistem pemberian layanan dari suatu program. Dalam upaya mengkaji nilai komponen pemberian layanan, hasil analisis harus dikaji berdasarkan kriteria yang relevan seperti, standar praktek terbaik (*best practice standarts*), kebijakan lembaga, tujuan proses dan kepuasan klien.
3. *evaluasi hasil* diarah pada evaluasi keseluruhan dampak (*overall impacK*) dari suatu program terhadap penerima layanan (*recipient*), Pertanyaan utama yang

muncul dalam evaluasi ini adalah: bila suatu program telah berhasil mencapai tujuannya, bagaimana penerima layanan akan menjadi berbeda setelah ia menerima layanan tersebut?

Berdasarkan pertanyaan ini seorang evaluator akan mengkonstruksikan kriteria keberhasilan dari suatu program. Kriteria keberhasilan ini akan dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan suatu program ataupun pada terjadinya perubahan perilaku dari klien.

Adapun menurut Hariwoejjanto yang mengemukakan bahwa CO merupakan suatu metode untuk membantu masyarakat agar dapat menggali dan mengerahkan sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhannya (*Tjokrowinoto, 2000:66*). Dalam penggunaan CO/CD, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1) Kebutuhan (*needs*)

Manusia hidup tentu tidak akan pernah terlepas dari kebutuhan dan kebutuhan yang dirasakan tersebut sering terjadi adanya kekurangan, sehingga menuntut manusia untuk berusaha mencari dan memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dalam hal ini meliputi kebutuhan fisik, kebutuhan mental dan kebutuhan sosial. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, papan. Kebutuhan mental berkaitan dengan kebutuhan akan pendidikan dan pengembangan diri, rasa aman dan terbebas dari segala bentuk ancaman, kebutuhan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bekerja dan memperoleh penghasilan, aktualisasi diri, rekreasi. Sedangkan kebutuhan sosial meliputi kebutuhan untuk dihargai orang lain diterima apa adanya, bergaul, berorganisasi dan menyatakan pendapat dihadapan orang banyak. Terkait dengan kebutuhan manusia, menurut Maslow ada lima jenis kebutuhan manusia (*Tjokrowinoto, 2000:73*), sebagai berikut:

- a. kebutuhan mempertahankan diri;
- b. kebutuhan rasa aman;
- c. kebutuhan sosial;
- d. kebutuhan akan penghargaan atau prestise;
- e. kebutuhan mempclinggi kapasitas kerja.

Maslow juga berpendapat bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan mempertahankan diri (Tjokrowinoto, 2000:74) mengatakan bahwa:

2) Sumber (*resources*)

Maksud dari sumber dalam kaitannya dengan CO/CD adalah sumber yang dapat dan dimanfaatkan untuk meraenuhi kebutuhan dalam masyarakat yang asalnya dari masyarakat sendiri. Menurut Tjokrowinoto ada tiga sumber terkait dengan CO/CD (2000:77), sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia, yaitu sumber yang diperoleh dari manusia berupa tenaga, pikiran, kekuatan, keterampilan, dan sebagainya;
- b. Sumber daya alam, yaitu sumber yang diperoleh dari alam semesta atau lingkungan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti air, batu, tanah, tumbuh-tumbuhan, mineral dan sebagainya;
- c. Sumber daya kelembagaan, yaitu sumber yang diperoleh dari lembaga atau badan sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti lembaga sosial, sekolah, rumah sakit, balai desa, dan sebagainya.

Hermawati juga menjelaskan, apabila ketiga sumber diatas dapat digali dan dimanfaatkan dengan baik, maka kebutuhan atau kekurangan yang ada di masyarakat dapat dipenuhi sehingga kesejahteraan dalam masyarakat tercapai.

3) Tujuan (*goal*)

Dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai masyarakat, maka proses pengarahan masyarakat menuju arah yang lebih baik akan lebih mudah. CO/CD merupakan sebuah proses, dimana proses tersebut terdiri dari dua elemen dasar, yaitu *pertama* partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan sendiri. *kedua*, bantuan dan pelayanan teknis yang bermaksud membangkitkan prakarsa untuk mendorong diri sendiri dan kesediaan membantu orang lain dari pemerintah yang orientasinya adalah munculnya kemandirian dan keberlanjutan dari proses yang

telah dilakukan (*sustainability*), dengan demikian harapannya adalah berbagai proses yang dijalankan akan mengena dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian memegang peranan yang penting karena dalam bab ini mengandung unsur metode pengumpulan data di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang. Menurut Singarimbun dan Efendi (dalam Sugiono 2004:18) bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran suatu konsep atau gejala.” sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Sugiyono (1997:23) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Implikasi dari penelitian ini adalah bertumpu pada pencarian data sebanyak-banyaknya. Data di lapangan dikumpulkan sejauh dianggap cukup, guna memberikan gambaran maksimal yang diinginkan untuk menentukan, membuktikan dan mengembangkan serta menjelaskan tentang suatu permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini penulis berusaha untuk mengidentifikasi, mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) “Suka Maju” yang ada di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam memanfaatkan potensi lokalnya.

3.2 Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Hal yang paling utama dan mendasar dalam penelitian kualitatif adalah *setting* penelitian. Seperti dinyatakan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Sugiyono: 1997:42), bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri. Penelitian ini langsung menunjukkan *setting* dan

individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan, subyek penelitian berupa individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.

Penelitian ini dilakukan pada kelompok budidaya ikan ” suka maju ” di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu desa yang mengandalkan budidaya ikan tawar dalam hal ini adalah ikan lele sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Diharapkan wilayah tersebut dapat menghasilkan gambaran yang mewakili wilayah serupa di wilayah yang lain, dan setidaknya bisa memunculkan gambaran tentang upaya pemberdayaan masyarakat yang mengandalkan potensi lokal dan lingkungannya.

3.3 Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang dapat menghasilkan data baik yang berupa keterangan-keterangan yang menggambarkan situasi dan kondisi obyek penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen (*dalam* Moleong 2000:64) bahwa:

“Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dijangkau, jadi sebagai internal sampling karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lain”.

Metode menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive*. Jadi dalam penelitian ini kriteria informan sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disusun. Berdasarkan metode tersebut akhirnya dipilih beberapa informan pokok yang menurut Sugiyono, 1997:47), mengatakan bahwa :

“Informan pokok harus dipenuhi 5 kriteria yang saling bertautan, yaitu :

- (1) Subyek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktif
- (2) Subyek yang masih terlibat secara penuh atau aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian
- (3) Subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi